

## Transformasi Birokrasi Berbasis Digital di Nagari Koto Laweh Sebagai Wujud Implementasi SDGs

Hanafi Saputra<sup>1\*</sup>, Annisa Citra Triyandra<sup>2</sup>, Putri Febri Wialdi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [hanafisaputra25@fis.unp.ac.id](mailto:hanafisaputra25@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Perkembangan teknologi telah memberikan ruang akselerasi di berbagai aspek, termasuk birokrasi. Pengurusan administrasi birokrasi sebagai ranah pelayanan masyarakat dewasa ini cenderung tidak lagi bersifat konvensional melainkan telah beralih pada sistem digitalisasi. Hal itu memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan ketepatan waktu dalam pengurusan serta manajemen birokrasi pelayanan publik yang juga menjadi salah satu indikator terciptanya pelayanan *E-governance*. Nagari Koto Laweh sebagai pusat pemerintahan lokal menghadapi tantangan dalam efektivitas birokrasi, terutama dalam pelayanan publik dan pengelolaan data yang masih banyak dilakukan secara manual dan bersifat konvensional. Sehingga penyediaan data induk nagari cenderung tidak terbarukan dan konvensional. Padahal, Koto Laweh sudah memiliki Website resmi, namun penggunaannya masih belum optimal, jika dilihat hanya 193 pengunjung dari websitenya. Perkembangan teknologi digital seyogyanya membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam birokrasi pemerintahan Nagari. Berangkat dari temuan permasalahan itu, maka kebaruannya terletak pada adanya proses pengembangan lebih lanjut transformasi birokrasi berbasis digital yang terkoneksi dalam data based di Nagari Koto Laweh dengan metode partisipatif dan kolaboratif dalam tiga tahap, yaitu pra program, program, dan pasca program. Tujuan program pengabdian ini untuk mendorong transformasi birokrasi berbasis digital di Nagari Koto Laweh guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Dengan target dan sasaran tim perangkat nagari, pengelola website nagari, dan masyarakat terjadi peningkatan skill dan keterampilan dalam manajemen data Nagari Koto Laweh dan partisipasi masyarakat melalui layanan mandiri pada website resmi nagari dalam proses birokrasi dan administrasi digital sebagai wujud implementasi SDGs. Hasil menunjukkan adanya peningkatan transformasi birokrasi berbasis digital pada objek pengabdian.

**Kata Kunci:** Digitalisasi; Transformasi Birokrasi Digital; Pelayanan Publik; SDGs.

### Abstract

Technological developments have accelerated progress in various aspects, including bureaucracy. Administrative management in bureaucracy as a realm of public service today tends to no longer be conventional but has shifted to a digitalized system. This provides convenience, flexibility, and timeliness in the management and administration of public service bureaucracy, which is also one of the indicators of the creation of E-governance services. Nagari Koto Laweh, as the center of local government, faces challenges in bureaucratic effectiveness, especially in public services and data management, which are still largely done manually and conventionally. As a result, the provision of nagari master data tends to be outdated and conventional. In fact, Koto Laweh already has an official website, but its use is still not optimal, as evidenced by only 193 visitors to the website. The development of digital technology should open up opportunities to improve efficiency and transparency in the Nagari government bureaucracy. Based on these findings, there is a need for further development of a digital-based bureaucratic transformation that is connected to a database in Nagari Koto Laweh using participatory and collaborative methods in three stages, namely pre-program, program, and post-program. The objective of this community service program is to encourage digital-based bureaucratic transformation in Nagari Koto Laweh in order to improve the quality of public services, administrative efficiency, and community participation in governance. With the targets and objectives of the village apparatus team, village website administrators, and the community, there has been an increase in skills and abilities in the management of Nagari Koto Laweh data and community participation through independent services on the official village website in the process of bureaucracy and digital administration as a form of SDG implementation.

**Keywords:** Digitalization; Digital Bureaucratic Transformation; Public Services; SDGs.

**How to Cite:** Saputra, H., Triyandra, A. C. & Wialdi, P. F. (2026). Transformasi Birokrasi Berbasis Digital di Nagari Koto Laweh Sebagai Wujud Implementasi SDGs. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 705-719.

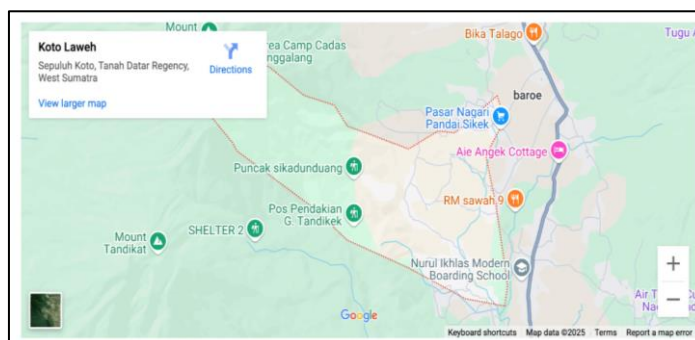


This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2026 by author.

## Pendahuluan

Teknologi yang terus berkembang hari ini, memberikan dampak pada arus informasi yang dapat diakses dengan begitu cepat (Kurniawatik, Khaerunnisa, & Tasya, 2021; Lekkas & Souitaris, 2023; Setiawan, 2018). Teknologi memberikan kemudahan penggunaannya dalam memperoleh informasi lebih canggih, cepat dan efisien (Diputra, Ni Ketut Desia Trisiantari, & I Nyoman Laba Jayanta, 2020; Lukman & Hakim, 2024a; Shao et al., 2023). *Website* sebagai salah satu sarana penyebaran informasi berbasis internet, kini memudahkan siapa saja untuk mengakses informasi dimanapun dan kapanpun (Dwi, Raharjo, Hardian, & Wahbi, 2022; Rafiq, 2020). *Website* dewasa ini banyak dimanfaatkan oleh instansi pemerintahan untuk menyediakan informasi yang lengkap dan terbaru (Damanik & Purwaningsih, 2017). Penggunaan *website* merupakan salah satu bentuk perwujudan *e-government* sekaligus wujud implementasi SDGs (Lukman & Hakim, 2024; Nurrahman et al, 2021). Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembagn *E-Government*, membuka ruang bagi pemerintah level pusat hingga daerah memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan fungsinya (Ibrahim & Wance, 2023; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, 2003). *Website* sebagai wujud *e-government*, dapat meningkatkan pelayanan publik lebih efektif dan efisien melalui peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan baik informasi publik maupun pelayanan publik (Alusi & Sensuse, 2014; Vrabie, 2023).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik adalah salah satu bentuk pelayanan publik dan menjadi kewajiban setiap badan publik baik yang ada di level nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2010). Kebutuhan masyarakat akan informasi terkini dan akurat, menuntut pemerintahan desa menyediakan ruang efisien dan efektif yang memberikan kemudahan sarana transparansi informasi dan pelayanan publik salah satunya melalui *website* nagari. Koto laweh berada di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar (RPJM Nagari Koto Laweh 2023-2029) Merupakan wilayah sentra pertanian penghasil sayur mayur berkualitas. Luas wilayahnya sekitar 727 Hektar atau 7,27 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 (lima) Jorong yakni Balai Gadang, Kapalo Koto, Batu Panjang, Pincuran Tujuh, dan Kandang Diguguak (RPJM Nagari Koto Laweh 2023-2029). Nagari Koto Laweh berpenduduk 3.337 jiwa, 1.677 jiwa Laki-laki dan 1.660 jiwa Perempuan dengan 922 Kepala Keluarga yang kepadatan penduduk 459 jiwa/Km<sup>2</sup>. Mata pencaharian penduduk Nagari Koto Laweh adalah petani 80%, Pegawai Negeri Sipil 5%, dan Wiraswasta 15% (RPJM Nagari Koto Laweh 2023-2029).

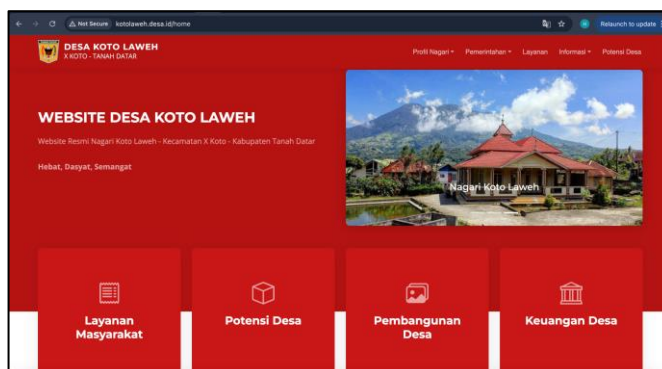


**Gambar 1. Peta Nagari Koto Laweh**

Sumber: <https://kotelaweh.desa.id/>

Permasalahan pemerintah Nagari Koto Laweh adalah keberadaan website nagari belum teroptimalkan dengan baik, proses pelayanan publik masih berbasis manual, dan proses birokrasi

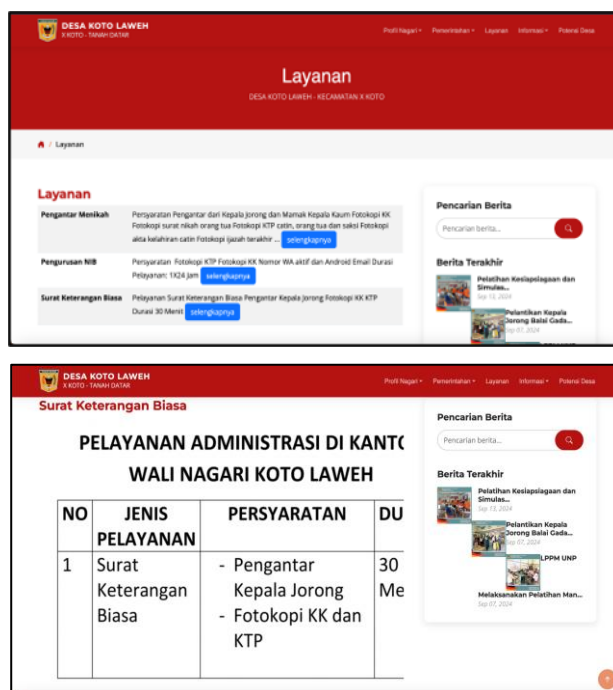
dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu. Selain itu, manajerial birokrasi kurang tertata dengan baik, sehingga database yang ada kurang terorganisir dengan baik. Terlebih belum adanya sistem yang terkoneksi pada manajemen data based.



**Gambar 2. Laman Website Nagari Koto Laweh**

Sumber: <https://kotalaweh.desa.id/>

Adanya fitur layanan publik pada *website* belum teroptimalkan dan digunakan sebagaimana mestinya. *Website* yang ada, masih bersifat penyedia informasi, padahal keberadaannya dapat membantu aksesibilitas masyarakat dan mempermudah pekerjaan perangkat dalam pemberian pelayanan publik. Hal tersebut dapat dilihat pada halaman *website* [kotalaweh.desa.id](https://kotalaweh.desa.id) khususnya di fitur layanan yang baru sebatas menyediakan informasi.



**Gambar 3. Laman Fitur Layanan Website Nagari Koto Laweh**

Sumber: <https://kotalaweh.desa.id/>

Terlihat bahwa pada satu sisi, Nagari Koto Laweh telah memiliki *website*. Tujuan dibuatnya *website* yaitu untuk media pelayanan publik resmi nagari, yang dibangun dan dikelola oleh tim nagari setempat. Melalui pemanfaatan *website*, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Disisi lain, hasil temuan saat pelaksanaan PKM tahun 2024, diketahui bahwa adanya keinginan besar dari pemerintah nagari untuk melakukan sistem pelayanan berbasis digital. Pengurusan surat-menyurat yang sifatnya umum dapat dilakukan oleh masyarakat tanpa harus mengunjungi kantor wali nagari berulang kali. Masyarakat dapat mengurus dan memperoleh surat yang diinginkannya dengan proses *online* berbasis *website* yang ada. Hal tersebut sebagaimana yang dipaparkan Sekretaris Nagari Koto Laweh:

---

“...*Website* ini kalau bisa dapat memberikan ruang kemudahan masyarakat dalam proses pengurusan surat menyurat. Masyarakat tidak mesti datang ke kantor, mereka bisa melakukan pengajuan menggunakan *website*. Itu membantu masyarakat dan mempermudah pekerjaan kami dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel...” — (Wawancara Sekretaris Nagari, 25 November 2024).

Diera digitalisasi yang semakin pesat, nagari dituntut tidak hanya sekedar memiliki akses internet saja, namun juga harus merujuk pada penggunaan teknologi dan informasi dalam menyimpan, mengelola dan penyebaran data (Digidis, 2023; Murdha Anggara, Hariyanto, Suhardi, Akhmad Arman, & Budi Kurniawan, 2024; Xiao, Zhang, & Han, 2023). Tuntutan *society 5.0*, penggunaan internet khususnya *website* merupakan hal yang harus dipenuhi. Sebab, *website* sebenarnya memiliki keuntungan manifes berupa etalase garda terdepan berbagai aspek, khususnya dalam promosi dan sumber informasi. Penggunaannya yang efektif dapat membuka kemungkinan baru termasuk pelayanan kepada masyarakat dan penyerapan informasi serta jangkauan masyarakat (Diputra et al., 2020; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2010; Suhendar, 2010).

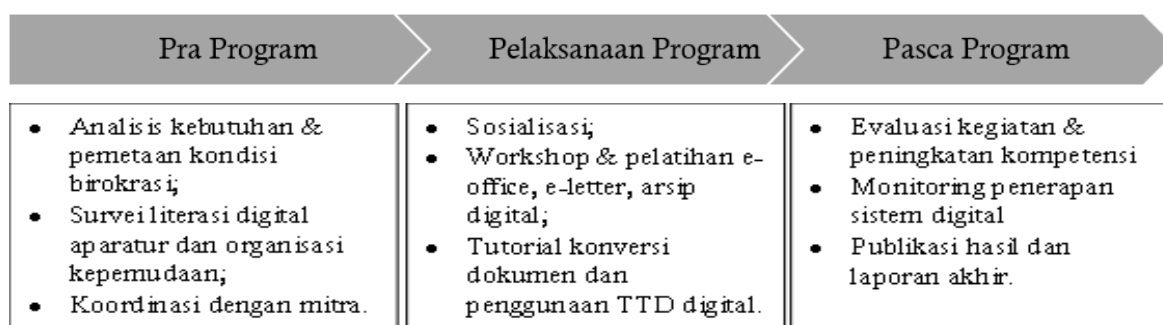
Faktanya, pemerintahan Nagari Koto Laweh masih belum dapat mengoptimalkan penggunaan *website* nagarinya sebagai sarana pelayanan publik karena keterbatasan skill dan SDM terampil. Padahal jika *website* tersebut dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik, akan membuka berbagai potensi dan peluang baru lebih luas bagi Nagari Koto Laweh. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan Mulyadi, Sd. Mantari Basa selaku Wali Nagari Koto Laweh, beliau menambahkan bahwa adanya tantangan dalam proses manajemen birokrasi serta manajemen data di Nagari dan SDM pengelola. Kondisi itu berpengaruh pada penyediaan data terbaru sebagai ranah pengelolaan data *based* yang belum berbasis digital. Melalui pengabdian masyarakat kemudian ber-tujuan untuk meningkatkan *skill* dalam mengoptimalkan fungsi *website* nagari, khususnya memberikan layanan publik yang efektif dan akuntabel bagi masyarakat berbasis digital, mempermudah tugas pengelolaan data base, dan efektifitas kerja bagi perangkat nagari sebagai garis terdepan memberikan pelayanan publik masyarakat Nagari Koto Laweh. Hal itu tidak hanya membantu mereka dalam mengembangkan partisipasi *online* semata, namun juga meningkatkan kesempatan mendapatkan peluang-peluang baru terkait dengan teknologi.

Mengacu pada beberapa tulisan terdahulu, transformasi digital birokrasi di Indonesia telah bergeser dari sekedar implementasi sistem ke-layanan elektronik (e-government) menuju tata kelola pemerintahan berbasis data, transparansi, dan kepercayaan publik. Menurut Manjali (2023), penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kebijakan reformasi birokrasi nasional menekankan pentingnya keselarasan misi-inovasi, kapasitas kelembagaan, dan infrastruktur digital dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dan partisipatif (Manjali, 2023). Studi lain menunjukkan bahwa optimasi e-government di tingkat lokal secara signifikan meningkatkan transparansi (koef. = 0,67) dan akuntabilitas (koef. = 0,72) pelayanan publik (Dwibin, Munawaroh, & Purwanto, 2025). Dengan demikian, aspek teknologi digital hanyalah bagian dari reformasi yang krusial adalah integrasi proses, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Pada level pemerintahan pedesaan/nagari, transformasi digital menghadapi hambatan tambahan seperti literasi digital masyarakat, gap infrastruktur, serta dinamika sosial-budaya lokal. Sebagai contoh, di Nagari Batipuah Ateh, studi menggunakan model TAM menemukan bahwa *perceived usefulness* dan *perceived compatibility* secara signifikan memengaruhi sikap terhadap penggunaan sistem SPBE ( $\beta = 0,41$  dan  $\beta = 0,29$ ), sedangkan ‘social influence’ ikut mempengaruhi niat perilaku ( $\beta = 0,18$ ) (Yuhfizar, Syaljumairi, Asri, Sarmiadi, & Watrianthos, 2025). Kemudian, pada tahun 2024 pelatihan produksi konten *website* bagi aparaturnagari Koto Laweh efektif meningkatkan kualitas digitalisasi pemerintahan, khususnya dalam penyediaan informasi publik yang lebih terbuka, terstruktur, dan mudah diakses. Program pendampingan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis perangkat nagari, tetapi juga mendorong kesadaran akan pentingnya transparansi dan tata kelola informasi berbasis digital (Saputra, Triyandra, & Amran, 2025).

Dalam konteks pengabdian masyarakat untuk nagari seperti Nagari Koto Laweh (Sumatera Barat), kajian terkini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pelatihan portal dan konten *website* nagari, inovasi masih berhenti pada digitalisasi permukaan belum menyentuh rekayasa ulang alur kerja, prosedur layanan, ataupun model partisipasi warga secara sistemik. Oleh karena itu, artikel pengabdian ini menempatkan bagaimana transformasi digital birokrasi di nagari Koto Laweh sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi meliputi redesign proses birokrasi, peningkatan kapasitas aparaturnagari, dan pemberdayaan warga melalui sistem digital. Dengan menggabungkan literatur nasional terkini dan konteks lokal nagari, intervensi tersebut memiliki potensi menjadi model praktik baik bagi nagari lain di Sumatera Barat maupun Indonesia.

## Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara tim pengabdian, aparatur pemerintahan, organisasi kepemudaan, serta masyarakat sekitar dalam mendukung proses transformasi birokrasi berbasis digital. Pendekatan partisipatif ini penting untuk menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap perubahan birokrasi menuju sistem digital yang lebih transparan dan efisien (Burlacu, Dobre, Mateescu, & Andrei, 2025). Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia birokrasi agar mampu beradaptasi dengan teknologi digital sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung ekosistem pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan (Desai & Manoharan, 2024). Proses kegiatan menyasar keseluruhan sebanyak 35 peserta dalam waktu pengabdian selama lebih kurang delapan kali kunjungan. Kegiatan ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu Pra Program, Pelaksanaan Program, dan Pasca Program. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4. Proses Pelaksanaan Pelatihan**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada tahap pra-pengabdian, kegiatan difokuskan pada analisis kebutuhan dan pemetaan kondisi birokrasi serta tingkat kesiapan digital di instansi mitra. Tim melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan aparatur untuk mengidentifikasi kendala utama dalam penerapan teknologi informasi dan manajemen dokumen. Selain itu, dilakukan survei literasi digital terhadap aparatur dan anggota organisasi kepemudaan guna mengetahui tingkat kemampuan mereka dalam mengoperasikan aplikasi digital dan kesiapan terhadap sistem baru (Prasodjo, 2025). Tahapan ini juga melibatkan koordinasi awal antara tim pengabdian, pimpinan instansi, dan tokoh masyarakat guna menyepakati tujuan kegiatan, sasaran capaian, serta jadwal pelaksanaan sesuai kebutuhan lokal.

Tahap pelaksanaan pengabdian merupakan inti kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas digital aparatur dan partisipasi masyarakat. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui organisasi kepemudaan, seperti karang taruna dan komunitas digital muda, untuk memperkenalkan konsep transformasi birokrasi digital serta pentingnya dukungan masyarakat dalam proses perubahan ini. Sosialisasi dilakukan secara interaktif melalui forum tatap muka dan diskusi terbuka agar tercipta pemahaman bersama tentang manfaat digitalisasi dalam pelayanan publik (Pietilä, Meriläinen, Varsaluoma, & Väänänen, 2021). Setelah itu, dilaksanakan workshop dan pelatihan teknis dengan pendekatan *learning by doing*, di mana peserta tidak hanya menerima materi teoritis, tetapi juga berlatih langsung menggunakan aplikasi administrasi digital seperti e-office, e-letter, dan sistem pengarsipan daring. Tim pengabdian juga memberikan tutorial praktis mengenai konversi dokumen manual ke format digital, penggunaan tanda tangan elektronik, serta pengelolaan arsip berbasis cloud.

Tahap pasca-pengabdian difokuskan pada evaluasi, monitoring, dan keberlanjutan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap peserta pelatihan untuk menilai peningkatan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem digital. Tim pengabdian juga melakukan kunjungan tindak lanjut (*follow-up visit*) ke instansi mitra untuk meninjau sejauh mana sistem digital telah diterapkan secara konsisten dalam kegiatan administrasi harian. Berdasarkan hasil evaluasi, tim menyusun rekomendasi kebijakan internal berupa strategi penguatan kapasitas digital aparatur dan pembentukan *Digital Bureaucracy Taskforce* yang melibatkan organisasi kepemudaan sebagai mitra pendukung berkelanjutan. Sebagai bentuk diseminasi pengetahuan, hasil kegiatan ini dipublikasikan dalam laporan resmi serta artikel ilmiah untuk memperkuat praktik baik transformasi birokrasi digital berbasis partisipasi masyarakat di tingkat lokal (Burlacu et al., 2025; Desai & Manoharan, 2024).

## Hasil dan Pembahasan

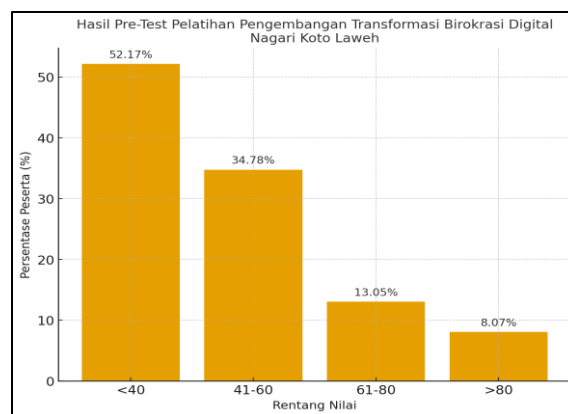
Pada bagian ini akan dijelaskan terkait dengan tahapan pelaksanaan dan pengimplementasian kegiatan pengabdian. Proses pertama yang dilakukan Tim Pengabdian yaitu dengan berkunjung ke Nagari Koto Laweh untuk melakukan FGD dengan pihak nagari, dilanjutkan dengan perencanaan proses pelatihan sekaligus membahas teknik pelaksanaan pelatihan yang dilakukan di Nagari Koto Laweh. Hal ini menegaskan bahwa program ini dapat maksimal jika dilaksanakan dengan tingkat partisipasi, komunikasi yang berkelanjutan, dan adaptasi terhadap konteks lokal (Damayanti & Syarifuddin, 2020; Kasri & Wirutomo, 2018). Adapun secara terperinci dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: (a) pra program; (b) pelaksanaan program; dan (c) pasca program.

### Pra Program

Pada kegiatan pra program, tim pengabdian bersama mitra melakukan pertemuan secara langsung dan juga online untuk membahas terkait dengan bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Kegiatan ini telah dimulai sejak awal perencanaan pelaksanaan pengabdian ini dilakukan. Bermula dari pertemuan FGD saat pelaksanaan pengabdian tahun sebelumnya, harapan dan keinginan dari mitra untuk dapat memiliki layanan mandiri yang dapat digunakan dalam proses pelayanan secara digital sebagai prinsip keberlanjutan dan institusi yang kuat (Ipa, Wirjatmadi, Devy, & Hartono, 2018; Ljunggren, Zuli Huang, Fang Wang, & Johansson, 2010; Yusriadi, Sugiharti, Ginting, Sandra, & Zarina, 2024). Berangkat dari hal itu, tim pengabdian kemudian mencoba melakukan pengumpulan data lebih lanjut terkait dengan bagaimana keinginan dan harapan dari mitra tersebut dapat terwujud. Pengkajian terkait dengan saranan yang tersedia, dalam hal ini website nagari yang telah ada, ditemukan permasalahan berupa keterbatasan fitur yang ada dalam website tersebut. Kesimpulan itu lahir usai dilakukannya diskusi oleh mitra dengan developer website yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Datar.

Dengan menggunakan jejaring yang dimiliki dan pengoptimalan kemampuan yang ada, tim pengabdian berhasil menemukan solusi konkrit agar keinginan dan target dari pengabdian ini dapat terimplementasi dengan baik. Solusi yang diperoleh yaitu dengan mengganti pihak penyedia website dari WebsiteDesa 2.0 menjadi OpenSID, dari website yang standar menjadi website yang premium. Setelah melakukan perubahan pihak penyedia website, tim pengabdian melakukan pengukuran atas sejauh mana pengetahuan digitalisasi dan birokrasi berbasis digital oleh perangkat nagari serta melibatkan perwakilan masyarakat yang difasilitasi oleh mitra agar dapat menjalankan fungsi pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, dan *accessible*. Bentuk kegiatan pra program tersebut adalah sebagai berikut:

Pre-test, tahapan yang dilalui mitra untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh tim pengabdian. Pertanyaan tersebut bersifat tertutup dan terbuka yang terdiri atas komponen indikator digitalisasi nagari dan birokrasi berbasis digital. Hasil pretest menunjukkan data sebagai berikut:



**Gambar 5. Hasil Pre Test Pemahaman Konsep Transformasi Birokrasi Digital**

Sumber: Hasil Olahan Tim Pengabdian

Dari hasil pretest tersebut menunjukkan mayoritas peserta masih memiliki pemahaman awal yang terbatas terhadap konsep transformasi birokrasi digital. Sebanyak 52,17% peserta berada pada rentang nilai dibawah 40, sementara 34,78% peserta bahkan berada pada rentang 41-60, yang menunjukkan rendahnya penguasaan terhadap materi dasar seperti SPBE, layanan publik digital, dan penggunaan teknologi dalam administrasi nagari. Sebaliknya, hanya 13,05% peserta yang mendapatkan nilai antara 61–80, dan hanya 8,07% yang mencapai nilai di atas 80. Nilai rata-rata keseluruhan peserta adalah 42, dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 35. Dengan begitu terlihat bahwa masih diperlukannya peningkatan kesadaran mereka akan pentingnya transformasi birokrasi digital.

Sosialisasi, tahapan yang dilakukan tim bersama mitra untuk menegaskan pentingnya digitalisasi dan transformasi birokrasi berbasis digital oleh pemangku kepentingan sebagai cara untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Nagari Koto Laweh. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan mitra dan stakeholder terkait (Marjadi & McLaws, 2010; Purnaningsih, Eny Palupi, Sulassih, & Anita Primaswari Widhiani, 2025; Rahmawati et al., 2023). Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, dilaksanakan proses sosialisasi di lokasi Aula Pertemuan Gedung Serba Guna Nagari Koto Laweh.



**Gambar 6. Pembukaan Acara Sosialisasi**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada saat sosialisasi, kegiatan acara dibuka langsung oleh Camat Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yaitu Mohd. Yahya Suryadi Putera, S.STP yang didampingi oleh Dandim dan Dandrem serta Wali Nagari Koto Laweh Mulyadi, Sd. Mantari Basa. Dalam sambutannya, beliau sangat mengapresiasi kegiatan dan inisiasi yang dilakukan serta Kerjasama yang terbangun antara mitra, Nagari Koto Laweh, dengan Universitas Negeri Padang. Setelah pembukaan, sosialisasi pun dilaksanakan.



**Gambar 7. Pemaparan Materi Oleh Narasumber**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dalam pemberian materi sosialisasi seputar transformasi birokrasi berbasis digital, tim pengabdian melibatkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Beberapa hal yang menjadi bahan pemaparan dalam sosialisasi tersebut yaitu pentingnya digitalisasi dewasa ini, bagaimana efek dominor dari digitalisasi, bagaimana memanfaatkan digitalisasi dan keterkaitannya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Narasumber juga menjelaskan pentingnya teknik penggunaan kamera sederhana berupa pemanfaatan gawai yang ada (Handphone) untuk pengabdian kegiatan. Kamera sederhana yang ada pada gawai masing-masing bisa digunakan untuk mengambil foto kegiatan sejauh pemotret mampu melakukan pengaturan atas pencahayaannya. Selain itu juga dijelaskan bahwa adanya beberapa aplikasi *free* yang dapat dimanfaatkan para peserta untuk melakukan proses editing atas hasil gambat yang ditangkap. Dalam kesempatan itu juga narasumber menjelaskan bagaimana pentingnya *website* sebagai ranah *branding* Nagari yang dapat sekaligus menjadi daya tarik dan daya jual untuk khalayak ramai. Sebab pemanfaatan *website* mampu menjangkau pengguna yang lebih luas melampaui batas ruang dan waktu.

Proses yang dilakukan tersebut berkaitan dengan tahapan perencanaan konten. Kegiatan ini saling terkait pada pengetahuan mitra akan pentingnya keterbukaan informasi publik yang membentuk sensibilitas mitra pada perancangan materi konten *website*. Selanjutnya, tahapan yang dilalui yaitu produksi konten. Pada tahapan ini, mitra memproduksi konten *website* sesuai perencanaan materi konten di tahap sebelumnya. Kegiatan ini pun memfasilitasi kebutuhan konten *website* agar materi yang diproduksi dapat dipercaya oleh publik (Salazar, Spiers, Fabyi, & Thompson, 2025). Dalam hal ini, proses produksi konten yang dimaksud berupa pengambilan gambar, pengaturan pencahayaan, dan pengeditan menggunakan perangkat sederhana yang dilakukan peserta pelatihan sebagai bentuk praktek teknik pembuatan berita. Dalam proses itu masing-masing peserta diminta untuk mengimprofisasi pengetahuannya dengan memberikan kebebasan bagi mereka untuk bekerja secara bebas (Abihiro, Leppert, Mbera, Robyn, & De Allegri, 2014; Kasri & Wirutomo, 2018; Ljunggren et al., 2010; Wikantiyoso et al., 2021). Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 8. Pemateri Melakukan Praktek Pembuatan Konten Menggunakan Alat Sederhana**  
Sumber. Dokumentasi Pribadi

Selain itu, inti dari sosialisasi tentu bagaimana memberikan peningkatan kesadaran mitra dan masyarakat akan arti perlunya transformasi birokrasi berbasis digital. Selain penjelasan seputar teknik pembuatan konten dan pengelolaan *website*, Tim pengabdian juga memaparkan bagaimana potensi perkembangan *website* Nagari Koto Laweh yang menjadi list teratas dalam pencarian. Setelah beberapa materi disampaikan kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan proses praktek. Peserta pelatihan diminta untuk mempraktekan teknik yang telah dipaparkan oleh narasumber. Dalam hal itu, peserta diminta mengambil foto kegiatan yang sedang dilakukan dengan memperhatikan teknik kamera dan pencahayaan dilakukan. Setelah itu Peserta diminta untuk melakukan pengeditan atas tangkapan gambar yang telah dilakukan. Hasil praktek yang dikerjakan peserta kemudian dikumpulkan untuk kemudian di evaluasi oleh narasumber.



**Gambar 9. Pelaksanaan Pelatihan Teknik Kamera, Pencahayaan, dan Editing**  
Sumber. Dokumentasi Pribadi

Dalam pemaparannya juga, narasumber menjelaskan bagaimana urgensi pengelolaan *website* sebagai estalase nagari yang dapat mempromosikan berbagai sumber daya yang ada. Setidaknya informasi dasar seputar Nagari Koto Laweh yang mustinya dapat diakses oleh banyak orang dengan melakukan pencarian menggunakan browser internet.

#### **Pelaksanaan Program**

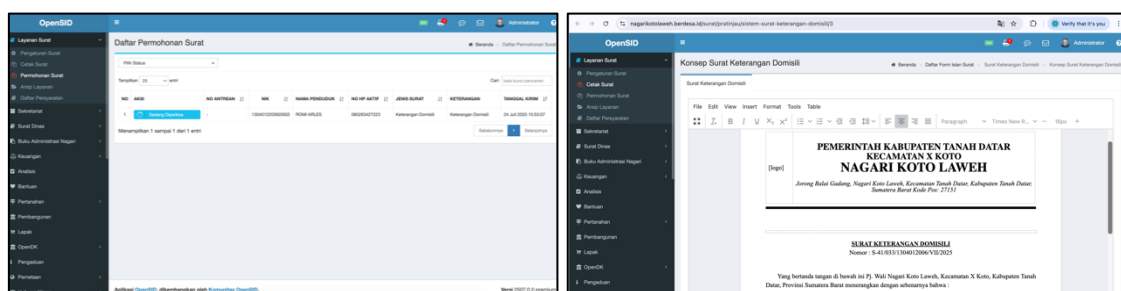
Pelaksanaan Program yang dilakukan ialah peoptimalan transformasi birokrasi berbasis digital yang bekerja sama dengan mitra sebagai pihak pengelola *website*. Pelatihan ini dilaksanakan menggunakan metode pelatihan secara langsung serta aktif dengan cara membangun ruang dialog bersama mitra agar prinsip partisipatif terus terjaga satu sama lain. Perencanaan fitur, kegiatan ini saling terkait pada pengetahuan mitra akan pentingnya transformasi birokrasi digital yang membentuk sensibilitas mitra pada optimalisasi pelayanan publik. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



**Gambar 10. Perencanaan Fitur**  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dalam kegiatan ini, tim pengabdian bersama dengan pihak mitra yang terdiri dari sekretaris nagari, kasi pemerintahan, kasi pelayanan, dan kasi perekonomian melakukan diskusi membahas bagaimana fitur yang akan diterapkan. Dalam proses ini terjadi diskusi dimana tim penyaji dengan perencanaan awal mencoba mengkomunikasikan dan memaparkan bagaimana tahapan dan bentuk rancangan sementara terkait dengan transformasi birokrasi berbasis digital. Pada diskusi tersebut, mitra juga menyampaikan bagaimana harapan dan keinginannya agar dapat diakomodasi dalam perencanaan yang ada. Setelah mengumpulkan data masukan dari hasil diskusi tersebut, tim pengabdian menyampaikan bahwa perlunya manajemen data yang diberikan oleh mitra agar dapat tertuang dalam wadah database website. Pengumpulan, pengkategorian, dan penyediaan tersebut menjadi bagian yang dibebankan kepada mitra. Hal itu mengingat, dokumen, data, dan berbagai kearsipan merupakan gawean yang diketahui mitra seutuhnya (Rahmawati et al., 2023; Srirejeki & Khairurizqo, 2025).

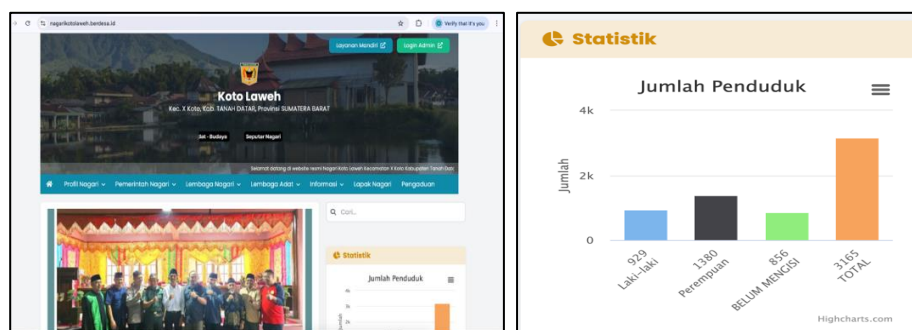
Manajemen data, pada tahapan ini, mitra menyusun dan manajemen data. Kegiatan ini pun memfasilitasi kebutuhan konten pada fitur *website* agar materi yang diproduksi dapat dipercaya oleh publik. Data yang dibutuhkan seutuhnya mendaji tanggung jawab mitra. Mitralah yang kemudian mengumpulkan, menyiapkan, mengatur, dan melakukan penginputan. Beberapa bahan data tersebut yaitu informasi statistik Nagari Koto Laweh, format surat, kode surat, dan pemilahan bagian mana yang perlu untuk di inputkan.



**Gambar 11. Laman Admin Dalam Penginputan dan Distribusi Data**

Sumber: <https://nagarikotolaweh.berdesa.id/>

Dari tangkapan layar tersebut dapat terlihat bagaimana beberapa fitur yang tersedia dalam laman admin. Dari fitur itu kemudian data yang ada kemudian dilakukan manajemen data. Mulai dari data umum tentang Nagari hingga hal lain yang lebih kompleks. Semua isian pada fitur tersebut tidak terlepas dari penyediaan bahan data oleh mitra. Distribusi data, tahapan kegiatan selanjutnya merupakan pendistribusian data melalui fitur *website* sehingga dapat menjalankan fungsi keterbukaan informasi pada publik. Data yang telah disediakan oleh mitra kemudian dilakukan proses pendistribusian ke dalam *website*. Semua fitur yang terdistribusikan pada *website* yang berkaitan dengan informasi dan data pelayanan mandiri diinputkan. Semua itu bertujuan untuk merealisasikan *website* yang dimiliki sebagai sarana kongkrit transformasi birokrasi berbasis digital.



**Gambar 12. Distribusi Data Pada Website**

Sumber: <https://nagarikotolaweh.berdesa.id/>

Dari tangkapan layar pada gambar di atas menunjukkan beberapa data yang telah didistribusikan. Data tersebut pada prinsipnya merupakan data yang saling berkaitan untuk penerapan pelayanan mandiri dan digitalisasi birokrasi. Data penduduk salah satunya, semua aktifitas tidak terlepas dari data penduduk, baik jumlah keluarga, distribusi berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, usia, dan sebagainya. Dari data itu juga, akun layanan mandiri masyarakat dapat terwujud, sebab untuk bisa masuk dan menggunakan fasilitas layanan mandiri, masyarakat harus memiliki akun dengan cara data mereka telah terdaftar dalam *database* nagari.

Pada gambar di atas menunjukkan bagaimana layanan mandiri yang menjadi fitur utama dari pengabdian ini. Masyarakat yang telah terdaftar dan telah memiliki akun, dapat menggunakan fitur tersebut. Dengan NIK dan password sebagai akunya, masyarakat kemudian bisa memanfaatkan untuk kemudian dapat melakukan pengajuan surat-menyurat atau pelayanan mandiri dimana pun dan kapan pun. Setelah tahapan ini jadi, dalam kegiatan yang masih berkesinambungan, tim pengabdian kemudian melakukan kegiatan pelatihan dan simulasi utuh kepada khususnya perangkat nagari.



**Gambar 13. Pelatihan dan Simulasi**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada tahapan yang terlihat pada gambar tersebut kemudian tim melakukan sosialisasi utuh berkaitan dengan fitur layanan mandiri dan bagaimana menerapkan serta menggunakan fitur yang ada. Sembari itu, turut dilaksanakan pratek langsung dengan perangkat nagari berupa simulasi penggunaannya. Apalagi sebagai perangkat, secara langsung mereka memiliki tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, dalam proses itu juga dilakukan pengawasan dan bimbingan teknik terkait penggunaan fitur sesuai bagian yang menjadi tanggung jawab individu perangkat. Tahapan itu kemudian diakhiri dengan distribusi konten, dimana kegiatan selanjutnya merupakan penyebaran informasi melalui konten *website* sehingga dapat menjalankan fungsi keterbukaan informasi pada publik. Hanya saja, dalam proses ini disimulasikan dengan mengunggah hasil produksi peserta menggunakan link yang telah disediakan oleh pemateri.

#### **Pasca Program**

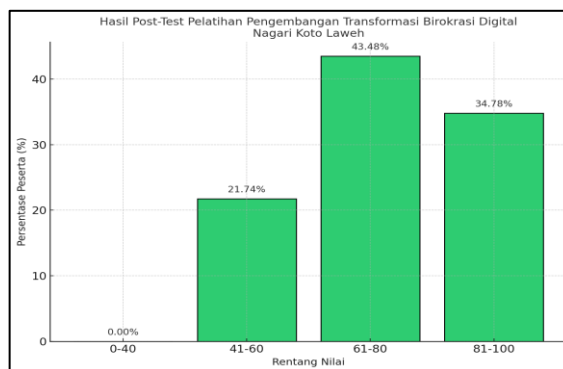
Pada kegiatan pasca program, tim pengabdian melakukan pengukuran terhadap perubahan pemahaman dan perilaku mitra setelah dilakukannya sosialisasi dan pelatihan. Selain itu, tahapan ini merupakan tahap evaluasi dari program pelatihan yang sudah terlaksana sebelumnya. Tahapan pasca program meliputi 2 kegiatan yaitu: Post test, kegiatan ini mengukur perubahan pengetahuan dan perilaku mitra saat sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan digitalisasi dan transformasi birokrasi berbasis digital.



**Gambar 14. Peserta Melakukan Post-Test Pasca Pelaksanaan Pelatihan**

Sumber. Dokumen Pribadi

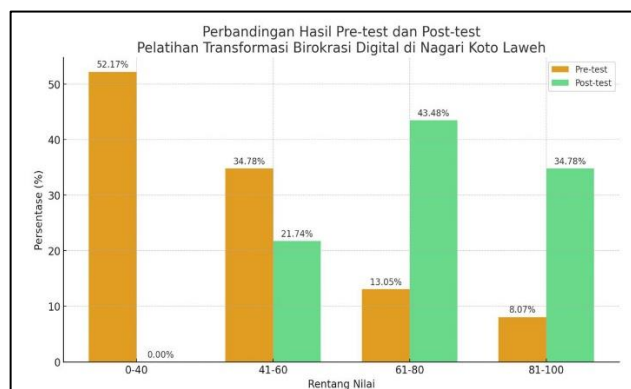
Dalam proses post-tes yang dilakukan ini, peserta kembali diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur seberapa paham dan seberapa tinggi perkembangan pengetahuan peserta pelatihan mengenai pembuatan konten dan pengelolaan *website*. Hal tersebut berguna untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana progres pengembangan pengetahuan dan *skill* dari peserta atas pelatihan yang telah dilakukan (Rahmawati et al., 2023; Srirejeki & Khairurrizqo, 2025). Perangkat pengukuran akan sama dengan perangkat pengukuran pre test yang dilakukan sebelumnya. Menyediakan pertanyaan terbuka dan tertutup tentang digitalisasi nagari dan birokrasi berbasis digital. Dari hasil portest yang dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut:



**Gambar 15. Hasil Post Test Pemahaman Konsep Trasnformasi Birokrasi Digital**

Sumber: Hasil Olahan Tim Pengabd

Berdasarkan hasil post test, dapat disimpulkan bahwa mayoritas peserta menunjukkan tingkat pemahaman yang baik terhadap materi pelatihan. Dari total peserta, sebanyak 34,78% memperoleh nilai dalam rentang 81-100 yang menunjukkan kategori pemahaman tinggi. Selanjutnya, 43,48% memiliki nilai antara 61-80, yang masuk dalam kategori sedang, menunjukkan mereka memahami materi dengan cukup baik. Sebanyak 21,74% memiliki nilai antara 41-60, yang masuk kategori cukup, menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman pada sebagian kecil peserta. Tidak ada peserta yang memperoleh nilai rendah pada rentang 0 hingga 40. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta dalam pengembangan transformasi birokrasi berbasis digital, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan pemahaman pada sebagian peserta. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan dan semangat para masyarakat yang menginginkan pengimplementasian digitalisasi birokrasi di Nagari Koto Laweh. nJika dilihat dari perbandingan hasil pos test dan pre test dapat divisualisasikan seperti pada gambar berikut:

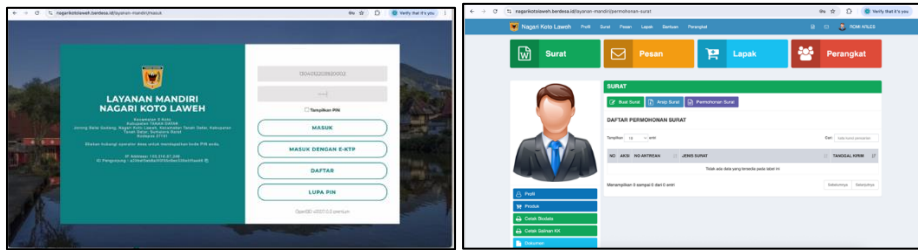


**Gambar 16. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Pelatihan**

Sumber. Olahan Pengabd

Perubahan pengetahuan dan perilaku mitra saat sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan produksi konten *website*. Perangkat pengukuran sama dengan perangkat pengukuran pre test yang dilakukan sebelumnya. Hal itu berupa menyediakan pertanyaan terbuka dan tertutup tentang digitalisasi nagari, proses produksi konten, dan keterbukaan informasi publik.

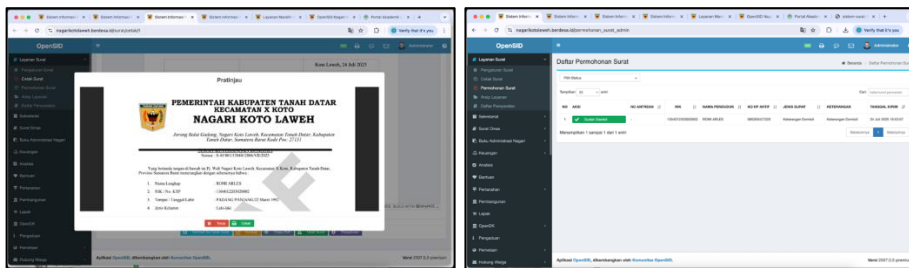
Evaluasi produksi, kegiatan evaluasi didapatkan setelah adanya hasil post test dari mitra. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring fitur pada *website* yang dibuat langsung oleh mitra. Dari tampilan hasil website pasca dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap output pelaksanaan pengabdian, terlihat bahwa website Nagari Koto Laweh telah berisi dan tertata dengan baik sebagaimana mestinya. Dari beberapa fitur yang tersedia telah memiliki informasi yang dapat diakses oleh publik. Di dalam itu turut terlihat bahasa berbagai aktifitas dan agenda Nagari sudah mulai terdokumentasi dan terpublikasi dengan baik. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengabdian dapat terlaksana dengan baik dan turut memberikan dampak baik berupa output yang terwujudkan melalui pengisian konten website Nagari Koto Laweh.



**Gambar 17. Laman Login Layanan Mandiri dan Laman Akun Layanan Mandiri**

Sumber: <https://nagarikotolaweh.berdesa.id/>

Kemudian, partisipasi mitra dalam kegiatan pelatihan digitalisasi dan transformasi birokrasi digital berbasis digital ini yaitu memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif (Indrarosa, Mariyono, Santoso, & Sutaryo, 2025; Salazar et al., 2025; Sulaiman, Masrukin, & Suswanto, 2019). Hal ini dimaknai bahwa mitra sebagai subjek aktif yang membuka ruang dialog mulai dari penentuan solusi hingga eksekusi pelatihan yang diberikan. Mitra adalah pihak yang menjadi pelaksana fungsi birokrasi di samping itu, mitra menjadi penopang teknis pelaksanaan program supaya berjalan sesuai perencanaan yang dirumuskan bersama seperti lokasi kegiatan, proses pelatihan, kesediaan sarana dan prasarana pelatihan. Sebagai upaya peningkatan digitalisasi dan keterbukaan informasi publik pada mitra, maka dilakukan evaluasi program dan keberlanjutan program.



**Gambar 18. Laman Admin Pengelola Website dan Perangkat Nagari**

Sumber: <https://nagarikotolaweh.berdesa.id/>

Dari gambar tersebut maka, evaluasi program meninjau keberhasilan pelatihan yang dilakukan dengan mengikuti beberapa indikator, di antaranya: (a) Perubahan pengetahuan dan perilaku mitra sebelum serta sesudah pelatihan yang dapat dilihat dari mengukur pemahaman dan kegiatan pelatihan digitalisasi dan transformasi birokrasi digital; (b) Perubahan pada fitur *website* sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih aksesibel; (c) Perubahan perilaku mitra dalam memanfaatkan *website* sebagai pemberi pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, dan *accessible*.

## Kesimpulan

Program pengabdian “Transformasi birokrasi berbasis digital di Nagari Koto laweh” telah dilaksanakan bulan Juni sampai Agustus 2024 dengan metode partisipasi dan kolaborasi dengan tahapan pelaksanaan pre-program, program, dan post-program. Program pengabdian ini diikuti oleh perangkat nagari di Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar. Program pengabdian ini telah mampu memberikan perubahan pengetahuan perangkat terkait arti pentingnya digitalisasi di masa kontemporer ini. Selain itu, keberadaan *website* nagari yang telah terwujud pada pengabdian yang juga dilakukan penulis pada tahun sebelumnya, telah berhasil dikembangkan sehingga lahir layanan mandiri yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mempermudah proses birokrasi secara digital. Dalam pengurusan surat-menyurat masyarakat dapat menggunakan fasilitas mandiri itu untuk melakukan pengurusan tanpa terbatas ruang dan waktu. Hal itu merupakan suatu terobosan baru yang menjadi dasar untuk Nagari Koto Laweh sebagai nagari digital. Lebih lanjut, sarana keterbukaan informasi telah memberikan ruang transparansi yang dapat di akses oleh masyarakat luas dan pelayanan masyarakat yang terukur.

Sebagai sarana baru dalam sistem transformasi birokrasi digital, keberaan layanan mandiri perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas. Adapun proses sosialisasi yang telah penulis lakukan, masih tergolong belum maksimal karna masih pada masyarakat dengan skala terbatas. Sebab untuk mencapai tahapan penerapan yang menyeluruh, proses sosialisasi perlu menjangkau masyarakat secara merata

khususnya di Nagari Koto Laweh. Sebagai program pengabdian, keberadaan digitalisasi birokrasi di Nagari Koto Laweh masih dapat dikembangkan lagi lebih lanjut. Program pengabdian yang dapat dilakukan yaitu optimalisasi layanan mandiri bagi masyarakat nagari Koto Laweh untuk mencapai terwujudnya difusi inovasi digital pada masyarakat Nagari Koto Laweh. Disamping itu, difusi inovasi bidang digitalisasi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah juga dapat dilakukan guna menunjang peningkatan perekonomian masyarakat dimana pemerintah nagari menjadi salah satu estalase promosi sekaligus penyedia ecommers berbasis digitalisasi lokal. Hal tersebut sekaligus sebagai sarana peningkatan kapasitas dan optimalisasi koperasi merah putih Nagari Koto Laweh.

## Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan, baik berupa pendanaan maupun fasilitasi, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Transformasi birokrasi berbasis digital di Nagari Koto laweh”, dan telah terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk mitra yaitu Nagari Koto Laweh, pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa yang turut berkontribusi dalam setiap tahap kegiatan. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sasaran serta menjadi kontribusi berkelanjutan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Abiuro, G. A., Leppert, G., Mbera, G. B., Robyn, P. J., & De Allegri, M. (2014). Developing Attributes And Attribute-Levels For A Discrete Choice Experiment On Micro Health Insurance In Rural Malawi. *Bmc Health Services Research*, *14*(1), 235. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-235>
- Alusi, F., & Dana, I. (2014). Penyusunan Strategi E-Government Berbasis Kerangka Kerja Peningkatan E-Government Indonesia (Pegi) di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. *Journal of Information Systems*, *10*(1), 38–44.
- Burlacu, S., Dobre, F., Mateescu, V.-M., & Andrei, I.-V. (2025). From Bureaucracy To E-Government: Digital Transformation Of Public Administration In Romania For A Sustainable Future. *European Journal Of Sustainable Development*, *14*(3), 289. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2025.v14n3p289>
- Damanik, M. P., & Erisva Hakiki Purwaningsih. (2017). E-Government Dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, *21*(2), 151–164.
- Damayanti, R., & Syarifuddin, S. (2020). The Inclusiveness of Community Participation in Village Development Planning in Indonesia. *Development in Practice*, *30*(5), 624–634. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>
- Desai, A., & Manoharan, A. P. (2024). Digital Transformation and Public Administration: The Impacts of India's Digital Public Infrastructure. *International Journal of Public Administration*, *47*(9), 575–578. <https://doi.org/10.1080/01900692.2024.2350762>
- Digides. (2023). Desa Digital: Menggali Potensi Desa Melalui Teknologi Terintegrasi. [digitaldesa.id](http://digitaldesa.id).
- Diputra, K. S., Ni Ketut Desia Trisiantari, & I Nyoman Laba Jayanta. (2020). Gerakan Literasi Digital Bagi Guru-Guru Sekolah Dasar. *Journal of Character Education Society*, *3*(1), 118–128.
- Dwi Harfianto, H., Raharjo, T., Hardian, B., & Wahbi, A. (2022). Agile Transformation Challenges And Solutions in Bureaucratic Government: A Systematic Literature Review. *2022 5th International Conference on Computers in Management and Business (Iccmb)*, 12–19. New York, Ny, USA: Acm. <https://doi.org/10.1145/3512676.3512679>
- Dwibin Kannapadang, Munawaroh, S., & Purwanto, S. A. (2025). Optimizing E-Government for Enhanced Transparency And Accountability in Local Governance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, *13*(5), 4203–4212. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3962>
- Ibrahim, A. H. H., Baharuddin, T., & Wance, M. (2023). Bibliometric Analysis Of E-Government And Trust: A Lesson For Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, *19*(3), 269–284. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1303>

- 
- Indrarosa, D., Mariyono, J., Santoso, S. I., & Sutaryo, S. (2025). The Effectiveness of Community-Based Eco-Farm Waste Management Training on Enhancing Farmers' Environmental Awareness: The Role of Government Support And Sustainability Attitudes. *Cleaner Waste Systems*, 12, 100394. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100394>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Ipa, A., Wirjatmadi, R. B., Devy, S. R., & Hartono, R. (2018). Qualitative Study: A History of Stunting in The Massenrempulu Community of Enrekang District. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, 9(12), 639. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.01909.5>
- Kasri, R., & Wirutomo, P. (2018). Determinants Of Citizen Engagement in Rural Water Supply and Sanitation Services in Indonesia. *E3s Web of Conferences*, 74, 08001. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187408001>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Ri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. , Kementerian Komunikasi dan Informatika Ri § (2010).
- Kurniawati, A. T., Khaerunnisa, & Tasya. (2021). Melek Information And Communications Technology (ICT) Pada Masyarakat Pedesaan di Era Globalisasi. *Cebong Journal*, 1(1), 01–09.
- Lekkas, C.-K., & Souitaris, V. (2023). Bureaucracy Meets Digital Reality: The Unfolding of Urban Platforms in European Municipal Governments. *Organization Studies*, 44(10), 1649–1678. <https://doi.org/10.1177/01708406221130857>
- Ljunggren, A., Zuli Huang, Fang Wang, & Johansson, E. (2010). Promoting Community Empowerment Among Rural Tibetans in China Using Focus Group Discussions. *Qualitative Health Research*, 20(9), 1183–1191. <https://doi.org/10.1177/1049732310370787>
- Lukman, S., & Hakim, A. (2024a). Agile Governance, Digital Transformation, and Citizen Satisfaction Moderated by Political Stability in Indonesia's Socio-Political Landscape. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(1), 210–228. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2001>
- Lukman, S., & Hakim, A. (2024b). Agile Governance, Digital Transformation, and Citizen Satisfaction Moderated by Political Stability in Indonesia's Socio-Political Landscape. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(1), 210–228. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2001>
- Manjali, R. (2023). Mission-Oriented Innovation Policy: E-Government Development Trajectory in Indonesia's Bureaucratic Reform. *Jejaring Administrasi Publik*, 15(1), 36–46. <https://doi.org/10.20473/jap.v15i1.47139>
- Marjadi, B., & Mclaws, M.-L. (2010). Rural Indonesian Health Care Workers' Constructs of Infection Prevention and Control Knowledge. *American Journal of Infection Control*, 38(5), 399–403. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2009.11.010>
- Murdha Anggara, S., Hariyanto, A., Suhardi, Akhmad Arman, A., & Budi Kurniawan, N. (2024). The Development of Digital Service Transformation Framework for The Public Sector. *IEEE Access*, 12, 146160–146189. <https://doi.org/10.1109/access.2024.3406571>
- Nurrahman, A., et al. (2021). Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Garut. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(1), 78–93.
- Pietilä, I., Meriläinen, N., Varsaluoma, J., & Väänänen, K. (2021). Understanding Youths' Needs for Digital Societal Participation: Towards an Inclusive Virtual Council. *Behaviour & Information Technology*, 40(5), 483–496. <https://doi.org/10.1080/0144929x.2021.1912182>
- Prasodjo, T. (2025). Rethinking Bureaucracy in The Digital Era: A Qualitative Review of Public Sector Transformation in Indonesia. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 5(2), 290–301. <https://doi.org/10.52970/Grse.V5i2.1425>
- Purnaningsih, N., Eny Palupi, Sulassih, S., & Anita Primaswari Widhiani. (2025). Optimizing Local Resources For Stunting Prevention and Community Health Promotion in Indonesia: A Mixed-Methods Study On Collaborative Communication And Extension. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 8(8), 676–688. <https://doi.org/10.56338/Mppki.V8i8.7520>
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 1(1), 18–29.
- Rahmawati, E., et al. (2023). Drafting And Implementation of Village Spatial Plan (RTRDES): A Case Study in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(9), 2757–2767. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180914>
- RPJM Nagari Koto Laweh 2023-2029. (2023).
-

- 
- Salazar, A. M., Spiers, S. S., Fabiyi, D. G., & Thompson, J. (2025). Implementing Interventions That Include Mentoring Components with Young People With Foster Care Experience: Lessons Learned from The Field. *Child Protection And Practice*, 5, 100135. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2025.100135>
- Saputra, H., Triyandra, A. C., & Amran, S. O. (2025). Nagari Website Content Production Training to Increase Digitalization And Openness of Information Dissemination Means in Nagari Koto Laweh Tanah Datar. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 584–593. <https://doi.org/10.24036/abdi.v7i2.1345>
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *Simbolika*, 4(1), 62–72.
- Shao, D., Ishengoma, F. R., Alexopoulos, C., Saxena, S., Nikiforova, A., & Matheus, R. (2023). Integration Of Iot Into E-Government. *Foresight*, 25(5), 734–750. <https://doi.org/10.1108/fs-04-2022-0048>
- Srirejeki, K., & Khairurrisqo, K. (2025). The Role Of Community Engagement As Corruption Control Strategy In Local Governments: Insights From Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 38(7), 872–894. <https://doi.org/10.1108/ijpsm-12-2024-0407>
- Suhendar, A. (2010). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja*, 13(2), 243–251.
- Sulaiman, A. I., Masrukin, M., & Suswanto, B. (2019). The Implementation of Community Empowerment Model as A Harmonization In The Village Traumatized By Terrorism Case. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 7(1), 59. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i1.257>
- Vrabie, C. (2023). E-Government 3.0: An AI Model to Use for Enhanced Local Democracies. *Sustainability*, 15(12), 9572. <https://doi.org/10.3390/su15129572>
- Wikantiyoso, R., Cahyaningsih, D. S., Sulaksono, A. G., Widayati, S., Poerwoningsih, D., & Triyosoputri, E. (2021). Development of Sustainable Community-Based Tourism in Kampong Grangsil, Jambangan Village, Dampit District, Malang Regency. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 9(1), 64–77. [https://doi.org/10.14246/irspsd.9.1\\_64](https://doi.org/10.14246/irspsd.9.1_64)
- Xiao, J., Zhang, H., & Han, L. (2023). How Digital Transformation Improve Government Performance: The Mediating Role of Partnering Agility. *IEEE Access*, 11, 59274–59285. <https://doi.org/10.1109/access.2023.3284793>
- Yuhefizar, Syaljumairi, R., Asri, E., Sarmiadi, & Watrianthos, R. (2025). Digital Transformation in Rural Governance: Tam Analysis of E-Government Adoption In Indonesia. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*, 06(02), 183–195. <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i02.03916>
- Yusriadi, Y., Sugiharti, S., Ginting, Y., Sandra, G., & Zarina, A. (2024). Preventing Stunting in Rural Indonesia: A Community-Based Perspective. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition And Development*, 24(9), 24470–24491. <https://doi.org/10.18697/ajfand.134.24820>